

**DAFTAR ISIAN  
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN**

Desa: SIWURAN  
Kecamatan: GARUNG  
Kabupaten: KABUPATEN WONOSOBO  
Provinsi: JAWA TENGAH  
Bulan: 12  
Tahun: 2018

Nama Pengisi: AHMAD ANWARRUDIN  
Pekerjaan: PERNAGKAT DESA  
Jabatan: SEKDES

Kepala Desa / Lurah: YAHYA  
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN  
UNTUK MENGISI PROFIL  
DESA/KELURAHAN

Referensi 1 : WAWANCARA  
Referensi 2: KK  
Referensi 3: SPPT  
Referensi 4:

**I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

**A. Jumlah Penduduk**

| Jumlah                     | Jenis Kelamin |            |
|----------------------------|---------------|------------|
|                            | Laki-laki     | Perempuan  |
| Jumlah penduduk tahun ini  | 2601 orang    | 2381 orang |
| Jumlah penduduk tahun lalu | 2570 orang    | 2330 orang |
| Persentase perkembangan    | 1.21 %        | 2.19 %     |

**B. Jumlah Keluarga**

| Jumlah                            | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah Kepala Keluarga tahun ini  | 1399 KK      | 141 KK       | 1540 KK      |
| Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 1389 KK      | 139 KK       | 1528 KK      |
| Prosentase Perkembangan           | 0.72 %       | 1.44 %       |              |

**II. EKONOMI MASYARAKAT**

**A. Pengangguran**

|  |            |
|--|------------|
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)                     | 2457 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 749 orang  |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga        | 585 orang  |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh                   | 1876 orang |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu             | 603 orang  |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja         | 5 orang    |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja               | 3 orang    |

**B. Kesejahteraan Keluarga**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Jumlah keluarga prasejahtera     | 228 keluarga  |
| 2. Jumlah keluarga sejahtera 1      | 379 keluarga  |
| 3. Jumlah keluarga sejahtera 2      | 455 keluarga  |
| 4. Jumlah keluarga sejahtera 3      | 305 keluarga  |
| 5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 173 keluarga  |
| 6. Total jumlah kepala keluarga     | 1540 keluarga |

**III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO**

**A. SUBSEKTOR PERTANIAN**

| Tanaman | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Jagung  | 25                 | 5                       | 750000000           | 0                    | 0                | 0               | 0                  |

**B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN**

| Tanaman | Luas Produksi (Ha) | Hasil Produksi (Ton/Ha) | Nilai produksi (Rp) | Biaya pemupukan (Rp) | Biaya bibit (Rp) | Biaya obat (Rp) | Biaya lainnya (Rp) |
|---------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|
|         |                    |                         |                     |                      |                  |                 |                    |

**C. SUBSEKTOR PETERNAKAN**

| Jenis Produksi | Hasil Produksi | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Jumlah Ternak (Ekor) |
|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--|----------------------|
|                |                |                     |                                    |  |                      |

**D. SUBSEKTOR PERIKANAN**

| Jenis Produksi | Hasil Produksi (Ton/Tahun) | Nilai produksi (Rp) | Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp) | Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp) | Total biaya antara yang dihabiskan (Rp) | Jenis usaha perikanan |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|
|                |                            |                     |                                    |  |   |                       |

**E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN**

|  |          |
|--|----------|
| Total nilai produksi tahun ini                       | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan                | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan            | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan                   | Rp. 0,00 |
| Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada | 0 jenis  |

**F. SUBSEKTOR KERAJINAN**

|   |                  |
|---|------------------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 1.500.000,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 400.000,00   |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 100.000,00   |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 500.000,00   |
| Total jenis kerajinan rumah tangga        | 1 jenis          |

**G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN****G.1. Subsektor Industri Pangan**

|   |                  |
|---|------------------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 2.500.000,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 1.100.000,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 400.000,00   |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 1.500.000,00 |
| Total jumlah jenis industri tsb yang ada  | 1 jenis          |

**H. SUBSEKTOR KEHUTANAN**

|   |          |
|---|----------|
| Total nilai produksi tahun ini            | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan baku yang digunakan     | Rp. 0,00 |
| Total nilai bahan penolong yang digunakan | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara yang dihabiskan        | Rp. 0,00 |

**I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN****I.1. Subsektor Perdagangan Besar**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Total nilai transaksi                 | Rp. 0,00 |
| Total nilai aset perdagangan yang ada | Rp. 0,00 |
| Total jumlah jenis perdagangan besar  | Rp. 0,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan    | Rp. 0,00 |
| Total biaya antara lainnya            | Rp. 0,00 |

**I.2. Subsektor Perdagangan Eceran**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Jumlah total jenis perdagangan eceran | 4 jenis           |
| Total nilai transaksi                 | Rp. 10.000.000,00 |
| Total nilai biaya yang dikeluarkan    | Rp. 1.500.000,00  |
| Total nilai aset perdagangan eceran   | Rp. 14.000.000,00 |

**I.3. Subsektor Hotel**

|   |          |
|---|----------|
| Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada | 0 jenis  |
| Jumlah total pendapatan                                   | Rp. 0,00 |
| Jumlah total biaya pemeliharaan                           | Rp. 0,00 |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan                      | Rp. 0,00 |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh                    | Rp. 0,00 |

**I.4. Subsektor Restoran**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Jumlah tempat penyediaan konsumsi | 0 Unit |
|-----------------------------------|--------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Biaya konsumsi yang dikeluarkan   | Rp. 0,00         |
| Biaya antara lainnya  | Rp. 0,00         |
| Jumlah total pendapatan yang diperoleh  | Rp. 0,00         |
| <b>J. Sektor Bangunan/Konstruksi</b>  |                  |
| Jumlah bangunan yang ada tahun ini  | 0 unit           |
| Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan   | Rp. 0,00         |
| Total nilai bangunan yang ada   | Rp. 0,00         |
| Biaya antara lainnya  | Rp. 0,00         |
| <b>K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan</b>  |                  |
| <b>K.1. Subsektor Bank</b>  |                  |
| Jumlah transaksi perbankan  | Rp. 0,00         |
| Jumlah nilai transaksi perbankan  | Rp. 0,00         |
| Jumlah biaya yang dikeluarkan   | Rp. 0,00         |
| <b>K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank</b>   |                  |
| Jumlah lembaga keuangan bukan bank  | 0 Unit           |
| Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank  | 0 Jenis          |
| Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank   | Rp. 0,00         |
| Biaya yang dikeluarkan  | Rp. 0,00         |
| <b>K.3. Subsektor Sewa Bangunan</b>   |                  |
| Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah   | 0 unit           |
| Total nilai persewaan yang dicapai  | Rp. 0,00         |
| Biaya yang dikeluarkan  | Rp. 0,00         |
| Biaya lainnya   | Rp. 0,00         |
| <b>K.4. Subsektor Jasa Perusahaan</b>   |                  |
| Jumlah perusahaan jasa  | 0 Jenis          |
| Nilai transaksi perusahaan jasa   | Rp. 0,00         |
| Biaya yang dikeluarkan  | Rp. 0,00         |
| Biaya lainnya   | Rp. 0,00         |
| <b>L. SEKTOR JASA-JASA</b>  |                  |
| <b>L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum</b>  |                  |
| Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat  | 0 unit           |
| Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat  | Rp. 0,00         |
| Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan  | Rp. 0,00         |
| <b>L.2. Subsektor jasa swasta</b>   |                  |
| Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat   | 0 jenis          |
| Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial   | Rp. 0,00         |
| Biaya yang dikeluarkan  | Rp. 0,00         |
| <b>L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi</b>   |                  |
| Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi  | 0 jenis          |
| Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi   | Rp. 0,00         |
| Biaya antara yang dikeluarkan   | Rp. 0,00         |
| <b>L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga</b>  |                  |
| Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga  | 0 jenis          |
| Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga   | Rp 0,00          |
| Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga  | Rp 0,00          |
| Biaya antara yang dikeluarkan   | Rp 0,00          |
| <b>M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI</b>  |                  |
| <b>M.1. Subsektor Angkutan</b>  |                  |
| Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan | 0 Jenis          |
| Jumlah total kendaraan angkutan   | 50 Unit          |
| Nilai total transaksi pengangkutan  | Rp 15.000.000,00 |
| Nilai total biaya yang dikeluarkan  | Rp 15.000.000,00 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>N. SEKTOR LISTRIK, GAS &amp; AIR MINUM</b>                                 |                     |
| <b>N.1. Subsektor Listrik</b>   |                     |
| Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik              | 0 Jenis             |
| Jumlah nilai produksi listrik   | Rp 0,00             |
| Jumlah total nilai transaksi  | Rp 0,00             |
| Jumlah biaya antara yang dikeluarkan  | Rp 0,00             |
| <b>N.2. Subsektor Gas</b>   |                     |
| Jumlah kegiatan penyediaan gas  | 0 jenis             |
| Nilai aset produksi gas   | Rp 0,00             |
| Nilai transaksi   | Rp 0,00             |
| Biaya antara yang dikeluarkan   | Rp 0,00             |
| <b>N.3. Subsektor Air Minum</b>   |                     |
| Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum                     | 0 jenis             |
| Nilai aset penyediaan air minum   | Rp 0,00             |
| Nilai produksi air minum  | Rp 0,00             |
| Nilai transaksi air minum   | Rp 0,00             |
| Biaya antara yang dikeluarkan   | Rp 0,00             |
| <b>IV. PENDAPATAN PERKAPITA</b>   |                     |
| <b>A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha</b>                           |                     |
| <b>A.1. Jasa dan perdagangan</b>  |                     |
| 1. Jumlah rumah tangga  | 550 Keluarga        |
| 2. Jumlah total anggota rumah tangga  | 1570 orang          |
| 3. Jumlah rumah tangga buruh tani   | 250 Keluarga        |
| 4. Jumlah anggota rumah tangga buruh  | 789 orang           |
| 5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp 1.500.000,00     |
| <b>B. PENDAPATAN RILL KELUARGA</b>  |                     |
| Jumlah Kepala Keluarga  | 1540 KK             |
| Jumlah Anggota Keluarga   | 4982 orang          |
| Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga   | Rp 1.925.000.000,00 |
| Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja                          | Rp 2.618.000.000,00 |
| <b>V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR</b>                            |                     |
| <b>1. Sektor Pertanian</b>  |                     |
| Petani  | 700 orang           |
| Buruh Tani  | 300 orang           |
| Pemilik Usaha Tani  | 1036 orang          |
| <b>2. Sektor Perkebunan</b>   |                     |
| Karyawan Perusahaan Perkebunan  | 0 orang             |
| Buruh perkebunan  | 0 orang             |
| Pemilik usaha Perkebunan  | 0 orang             |
| <b>3. Sektor Peternakan</b>   |                     |
| Peternakan Perorangan   | orang               |
| Buruh Usaha Peternakan  | orang               |
| Pemilik Usaha Peternakan  | orang               |
| <b>4. Sektor Perikanan</b>  |                     |
| Nelayan   | orang               |
| Buruh Usaha Perikanan   | orang               |
| Pemilik Usaha Perikanan   | orang               |
| <b>5. Sektor Kehutanan</b>  |                     |
| Pengumpul Hasil Hutan   | orang               |
| Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan  | orang               |
| Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan  | orang               |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C</b>             |           |
| Penambang Galian C Perorangan                                | orang     |
| Buruh Usaha Pertambangan                                     | orang     |
| Pemilik Usaha Pertambangan                                   | orang     |
| <b>7. Sektor Industri Kecil &amp; Kerajinan Rumah Tangga</b> |           |
| <b>8. Sektor Industri Menengah dan Besar</b>                 |           |
| <b>9. Sektor Perdagangan</b>                                 |           |
| Karyawan Perdagangan Hasil Bumi                              | 213 orang |
| Buruh Perdagangan Hasil Bumi                                 | 150 orang |
| Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi                             | 512 orang |
| <b>10. Sektor Jasa</b>                                       |           |

**VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>A. ASET TANAH</b>   |                   |
| Tidak memiliki tanah   | 2803 orang        |
| Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha   | 230 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha  | 156 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha  | 356 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha  | 145 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha  | 256 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha  | 354 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha  | 213 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha  | 213 orang         |
| Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha  | 256 orang         |
| Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha   | 0 orang           |
| memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha  | 0 orang           |
| Memiliki tanah lebih dari 10 ha  | 0 orang           |
| Jumlah total penduduk  | 4982 orang        |
| <b>B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM</b>  |                   |
| Memiliki ojek  | 30 orang- 30 unit |
| Memiliki mini bus  | 1 orang- 1 unit   |
| <b>C. ASET SARANA PRODUKSI</b>   |                   |
| Memiliki penggilingan padi   | orang             |
| Memiliki traktor   | orang             |
| Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian   | orang             |
| Memiliki kapal penangkap ikan  | orang             |
| Memiliki alat pengolahan hasil perikanan   | orang             |
| Memiliki alat pengolahan hasil peternakan  | orang             |
| Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan  | orang             |
| Memiliki alat pengolahan hasil hutan   | orang             |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan   | orang             |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata   | orang             |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan                            | orang             |
| Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | orang             |
| Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas                                     | orang             |
| <b>D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING</b>   |                   |
| <b>RUMAH MENURUT LANTAI</b>  |                   |
| <b>RUMAH MENURUT ATAP</b>  |                   |

**VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA**

|  |              |
|--|--------------|
| Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya         | 980 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya            | 90 Keluarga  |
| Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional      | 112 Keluarga |
| Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan | 5 Keluarga   |

**VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT****A. Tingkat Pendidikan Penduduk**

|  |            |
|--|------------|
| Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin                            | 2 orang    |
| Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | 304 orang  |
| Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental                        | 3 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat                                   | 360 orang  |
| Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat                                    | 2985 orang |
| Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat                              | 23 orang   |
| Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat                                 | 300 orang  |
| Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat                                  | 557 orang  |
| Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat                                 | 275 orang  |
| Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat                            | 147 orang  |
| Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat                                  | 351 orang  |
| Jumlah penduduk sedang D-1   | 2 orang    |
| Jumlah penduduk tamat D-1  | 6 orang    |
| Jumlah penduduk sedang D-2   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat D-2  | 6 orang    |
| Jumlah penduduk sedang D-3   | 7 orang    |
| Jumlah penduduk tamat D-3  | 20 orang   |
| Jumlah penduduk sedang S-1   | 8 orang    |
| Jumlah penduduk tamat S-1  | 19 orang   |
| Jumlah penduduk sedang S-2   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat S-2  | 2 orang    |
| Jumlah penduduk tamat S-3  | 0 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SLB A   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SLB A  | 0 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SLB B   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SLB B  | 0 orang    |
| Jumlah penduduk sedang SLB C   | 0 orang    |
| Jumlah penduduk tamat SLB C  | 0 orang    |
| Jumlah penduduk cacat fisik dan mental                                 | 0 orang    |

**B. Wajib belajar 9 tahun**

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun                    | 657 orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 637 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 20 orang  |

**C. Rasio Guru dan Murid**

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak  | 10 orang  |
| 2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | 204 orang |
| 3. Jumlah guru SD dan sederajat              | 16 orang  |
| 4. Jumlah siswa SD dan sederajat             | 360 orang |
| 5. Jumlah guru SLTP dan sederajat            | 45 orang  |
| 6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat           | 855 orang |
| 7. Jumlah guru SLTA/ sederajat               | 0 orang   |
| 8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat              | 0 orang   |
| 9. Jumlah siswa SLB                          | 0 orang   |
| 10. Jumlah guru SLB                          | 0 orang   |

**D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat**

|   |            |
|---|------------|
| Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan             | 0 unit     |
| Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan             | 0 unit     |
| Jumlah perpustakaan keliling                    | 0 unit     |
| Jumlah sanggar belajar                          | 0 unit     |
| Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | 0 kegiatan |
| Jumlah kelompok belajar Paket A                 | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket A                    | 4 orang    |
| Jumlah kelompok belajar Paket B                 | 0 kelompok |
| Jumlah Peserta ujian Paket B                    | 5 orang    |
| Jumlah kelompok belajar Paket C                 | 0 kelompok |
| Jumlah peserta ujian Paket C                    | 4 orang    |
| Jumlah lembaga kursus keterampilan              | 0 unit     |
| Jumlah peserta kursus keterampilan              | 0 orang    |

**IX. KESEHATAN MASYARAKAT****A. Kualitas Ibu Hamil**

|   |                |
|---|----------------|
| Jumlah ibu hamil  | 48 orang       |
| Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu  | 48 orang       |
| Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas   | 10 orang       |
| Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit   | 4 orang        |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek  | 0 orang        |
| Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek   | 6 orang        |
| Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih  | 1 orang        |
| Jumlah kematian ibu hamil   | 3 orang        |
| Jumlah ibu hamil melahirkan   | 40 orang       |
| Jumlah ibu nifas  | 0 orang        |
| Jumlah kematian ibu nifas   | 0 orang        |
| Jumlah ibu nifas hidup  | 0 orang        |
| <b>B. Kualitas Bayi</b>   |                |
| Jumlah keguguran kandungan  | 3 orang        |
| Jumlah bayi lahir   | 80 orang       |
| Jumlah bayi lahir mati  | 0 orang        |
| Jumlah bayi lahir hidup   | 77 orang       |
| Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan   | 0 orang        |
| Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan  | 0 orang        |
| Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg  | 0 orang        |
| Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang        |
| <b>C. Kualitas Persalinan</b>   |                |
| <b>Tempat Persalinan</b>  |                |
| Tempat persalinan Rumah Sakit Umum  | 0 unit         |
| Tempat persalinan Rumah Bersalin  | 0 unit         |
| Tempat persalinan Puskesmas   | 0 unit         |
| Tempat persalinan Polindes  | 1 unit         |
| Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak  | 0 unit         |
| Tempat persalinan rumah praktek bidan   | 1 unit         |
| Tempat praktek dokter   | 0 unit         |
| Rumah dukun   | 0 unit         |
| Rumah sendiri   | 0 unit         |
| <b>Pertolongan Persalinan</b>   |                |
| Jumlah Persalinan ditolong Dokter   | 30 tindakan    |
| Jumlah persalinan ditolong bidan  | 45 tindakan    |
| Jumlah persalinan ditolong perawat  | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin   | 0 tindakan     |
| Jumlah persalinan ditolong keluarga   | 0 tindakan     |
| <b>D. Cakupan Imunisasi</b>   |                |
| Jumlah Bayi usia 2 bulan  | 24 orang       |
| Jumlah bayi 2 bulan imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1                             | 24 orang       |
| Jumlah bayi usia 3 bulan  | 17 orang       |
| Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2                              | 17 orang       |
| Jumlah bayi usia 4 bulan  | 15 orang       |
| Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3                              | 15 orang       |
| Jumlah bayi 9 bulan   | 21 orang       |
| Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak   | 21 orang       |
| Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar  | 55 orang       |
| <b>E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB</b>                                 |                |
| <b>Pasangan Usia Subur</b>  |                |
| Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun  | 245 orang      |
| Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun   | 1.329 orang    |
| Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun                                | 0 orang        |
| Jumlah pasangan usia subur  | 1.120 pasangan |
| <b>Keluarga Berencana</b>   |                |
| Jumlah akseptor KB  | 0 orang        |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik   | 856 orang      |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral   | 56 orang       |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom   | 126 orang      |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil  | 82 orang       |
| Jumlah pengguna metode vasektomi  | 0 orang        |
| Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi                                      | 0 orang        |

|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
| Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah                                  | 0 orang                 |                    |
| Jumlah pengguna metode KB obat tradisional                                     | 0 orang                 |                    |
| Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx                                    | 0 orang                 |                    |
| Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB                                    | 0 orang                 |                    |
| <b>F. Wabah Penyakit</b>   |                         |                    |
| <b>G. Angka Harapan Hidup</b>  |                         |                    |
| Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan                                    | 98,00 Tahun             |                    |
| Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota                                    | 0,00 Tahun              |                    |
| Angka Harapan Hidup Provinsi   | 0,00 Tahun              |                    |
| Angka harapan Hidup Nasional   | 0,00 Tahun              |                    |
| <b>H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih</b>                               |                         |                    |
| 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali                                      | 0 Keluarga              |                    |
| 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM   | 50 Keluarga             |                    |
| 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan                             | 0 Keluarga              |                    |
| 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa                                     | 0 Keluarga              |                    |
| 5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran                              | 0 Keluarga              |                    |
| 6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum                                     | 0 Keluarga              |                    |
| 7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai                                      | 0 Keluarga              |                    |
| 8. Jumlah keluarga menggunakan embung  | 0 Keluarga              |                    |
| 9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air                                   | 4.982 Keluarga          |                    |
| 10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut       | 0 Keluarga              |                    |
| 11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas | 0 Keluarga              |                    |
| Total jumlah keluarga  | 5.032 Keluarga          |                    |
| <b>I. Perilaku hidup bersih dan sehat</b>                                      |                         |                    |
| Kebiasaan buang air besar  |                         |                    |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat   | 1.216 Keluarga          |                    |
| Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan             | 234 Keluarga            |                    |
| Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan              | 0 Keluarga              |                    |
| Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum                            | 90 Keluarga             |                    |
| <b>Pola makan</b>  |                         |                    |
| Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali                                     |                         |                    |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali   |                         |                    |
| Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali   | Ada                     |                    |
| Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali                              | Ada                     |                    |
| Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali                                  |                         |                    |
| <b>Kebiasaan berobat bila sakit</b>  |                         |                    |
| Dukun Terlatih   | Sedikit                 |                    |
| Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu                       | Sedikit                 |                    |
| Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif                              |                         |                    |
| Paranormal   |                         |                    |
| Obat tradisional dari keluarga sendiri   |                         |                    |
| Tidak diobati  |                         |                    |
| <b>J. Status Gizi Balita</b>   |                         |                    |
| Jumlah Balita  | 513 orang               |                    |
| Jumlah Balita bergizi buruk  | 3 orang                 |                    |
| Jumlah Balita bergizi baik   | 500 orang               |                    |
| Jumlah Balita bergizi kurang   | 5 orang                 |                    |
| Jumlah Balita bergizi lebih  | 5 orang                 |                    |
| <b>K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini</b>                                     |                         |                    |
| <b>Jenis penyakit</b>  | <b>Jumlah penderita</b> | <b>Di rawat di</b> |
| Kanker   | 5 orang                 | Rumah sakit        |
| Stroke   | 15 orang                | Rumah sakit        |
| Asma   | 10 orang                | Rumah sakit        |
| <b>L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat</b>               |                         |                    |
| Jumlah MCK Umum  | 0 unit                  |                    |
| Jumlah Posyandu  | 0 unit                  |                    |
| Jumlah kader Posyandu aktif  | 0 orang                 |                    |



|  |             |
|--|-------------|
| Jumlah pembina Posyandu                          | 0 orang     |
| Jumlah Dasawisma                                 | 0 Dasawisma |
| Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif                 | 0 orang     |
| Jumlah kader bina keluarga balita aktif          | 0 orang     |
| Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 0 orang     |
| Buku rencana kegiatan Posyandu                   |             |
| Buku data pengunjung Posyandu                    |             |
| Buku kegiatan pelayanan Posyandu                 |             |
| Buku administrasi Posyandu lainnya               | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan Posyandu                         | 0 jenis     |
| Jumlah kader kesehatan lainnya                   | 0 orang     |
| Jumlah kegiatan pengobatan gratis                | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN  | 0 jenis     |
| Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan           | 0 jenis     |
| Lainnya  | 0 jenis     |

## X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

### A. Konflik SARA

|   |         |
|---|---------|
| Kasus konflik pada tahun ini  | 0 kasus |
| Kasus konflik SARA pada tahun ini   | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga   | 0 kasus |
| Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW  | 0 kasus |
| Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli  | 0 kasus |
| Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain | 0 kasus |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah  | 0 kasus |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah  | Rp 0,00 |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah   | 0 orang |
| Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan  | 0 orang |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan   | 0 orang |
| Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah  | 0 orang |
| Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik   | 0 kasus |
| Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                              | 0 orang |
| Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik                        | Rp 0,00 |
| Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara   | 0 buah  |
| Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara   | 0 rumah |
| Jumlah korban luka akibat konflik Sara  | 0 orang |
| Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara   | 0 orang |
| Jumlah janda akibat konflik Sara  | 0 orang |
| Jumlah anak yatim akibat konflik Sara   | 0 orang |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum   | 0 orang |

### B. Perkelahian

|   |         |
|---|---------|
| Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini                 | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa                | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah                 | 0 kasus |
| Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material          | 0 kasus |
| Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum | 0 orang |

### C. Pencurian

|  |         |
|--|---------|
| Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini                      | 1 kasus |
| Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
| Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat | 0 kasus |
| Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api                              | 0 kasus |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum                      | 0 orang |

### D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

|   |       |
|---|-------|
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat                            | kasus |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat | kasus |
| Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat | kasus |
| Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum   | orang |

### E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan

|  |       |
|--|-------|
| Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi            | orang |
| Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini             | orang |
| Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan                 | orang |
| Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang | orang |

|  |       |
|--|-------|
| <b>F. Pemakaian Miras dan Narkoba</b>  |       |
| Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras  | buah  |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras  | orang |
| Jumlah kasus mabuk akibat Miras  | kasus |
| Jumlah pengedar Narkoba  | orang |
| Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba  | orang |
| Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba  | kasus |
| Jumlah kasus kematian akibat Narkoba   | kasus |
| Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum  | orang |
| Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum  | orang |
| <b>G. Prostitusi</b>   |       |
| Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat   | orang |
| Lokalisasi prostitusi  |       |
| Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll) | buah  |
| Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi  | kasus |
| Jumlah pembinaan pelaku prostitusi   | kali  |
| Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi   | kali  |
| <b>H. Pembunuhan</b>   |       |
| Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini   | orang |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat   | kasus |
| Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat  | kasus |
| Jumlah kasus bunuh diri  | kasus |
| Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum  | kasus |
| <b>I. Penculikan</b>   |       |
| Jumlah kasus penculikan  | kasus |
| Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat   | kasus |
| Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat  | kasus |
| Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum   | kasus |
| <b>J. Kejahatan seksual</b>  |       |
| Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini  | kasus |
| Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini   | kasus |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara  | kasus |
| Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat  | kasus |
| Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks  | unit  |
| <b>K. Masalah Kesejahteraan Sosial</b>   |       |
| Jumlah gelandangan   | orang |
| Jumlah pengemis jalanan  | orang |
| Jumlah anak jalanan dan terlantar  | orang |
| Jumlah manusia lanjut usia terlantar   | orang |
| Jumlah orang gila/stress/cacat mental  | orang |
| Jumlah orang cacat fisik   | orang |
| Jumlah orang kelainan kulit  | orang |
| Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan   | orang |
| Jumlah rumah dan kawasan kumuh   | unit  |
| Jumlah panti jompo   | unit  |
| Jumlah panti asuhan anak   | unit  |
| Jumlah rumah singgah anak jalanan  | unit  |
| Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota   | orang |
| Jumlah penghuni bantaran sungai  | orang |
| Jumlah penghuni pinggir rel kereta api   | orang |
| Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya   | orang |
| Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif                         | orang |
| Jumlah anak yatim usia 0-18 tahun  | orang |
| Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun   | orang |
| Jumlah anak yatim piatu 0-18 tahun   | orang |
| Jumlah janda   | orang |
| Jumlah duda  | orang |
| Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran   | orang |
| Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat  | orang |
| Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat   | orang |
| Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat   | orang |
| Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang   | orang |

|   |          |
|---|----------|
| Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga   | orang    |
| Jumlah penduduk eks NAP1  | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir  | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi   | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami   | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi  | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah   | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekeringan  | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor   | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan   | orang    |
| Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan   | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih  | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus   | orang    |
| Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh   | orang    |
| Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk  | orang    |
| Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman   | orang    |
| <b>L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>  |          |
| Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri   | kasus    |
| Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami   | kasus    |
| Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak  | kasus    |
| Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua  | kasus    |
| Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya  | kasus    |
| <b>M. Teror dan Intimidasi</b>  |          |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan   | kasus    |
| Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan   | kasus    |
| Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk  | kasus    |
| Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini   | kasus    |
| Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat   | kasus    |
| Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal   | kasus    |
| <b>N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta</b>  |          |
| Organisasi Siskamling   |          |
| Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat   |          |
| Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda  | RT       |
| Jumlah anggota Hansip dan Linmas  | orang    |
| Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda  |          |
| Buku anggota Hansip dan Linmas  | jenis    |
| Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta   | unit     |
| Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah   | kegiatan |
| Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan  | Pos      |
| <b>XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT</b>  |          |
| <b>A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara</b>  |          |
| Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara   | jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara  | kegiatan |
| Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika  | jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika   | kegiatan |
| Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya   | jenis    |
| Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya  | kegiatan |
| Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri  | kasus    |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi  | orang    |
| Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi   | orang    |
| Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan                                  | kasus    |
| Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga  | kasus    |
| Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini   | kasus    |
| Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan   | kasus    |
| Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini  | kasus    |
| Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara                              | kasus    |
| Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini   | kasus    |
| Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi. | kasus    |

|   |  |
|---|--|
| Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya  | kasus  |
| Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah | kasus  |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan   | kasus  |
| Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain  | kasus  |
| <b>B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi</b>  |  |
| Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan  | 1 jenis  |
| Jumlah Wajib Pajak  | 3163 orang   |
| Target PBB  | Rp 84.049.669,00   |
| Realisasi PBB   | 100,00 %   |
| Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB  | 0 tindakan   |
| Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan   | 1 jenis  |
| Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan   | 8 orang  |
| Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan   | Rp 0,00  |
| Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan  | 0,00 %   |
| Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan  | 0 jenis  |
| Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan  | Rp 0,00  |
| Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan  | 0,00 %   |
| Jumlah kasus pungutan liar  | 0 kasus  |
| Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar   | 0 kasus  |
| <b>C. Partisipasi Politik</b>   |  |
| <b>1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum</b>  |  |
| Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih   | orang  |
| Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu   | orang  |
| Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik  | orang  |
| Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini   | partai   |
| Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini   | partai   |
| Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan  | orang  |
| Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu  | orang  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil  | pemilih  |
| <b>2. Pemilihan Kepala Daerah</b>   |  |
| Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih  | orang  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu   | pemilih  |
| Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu   | pemilih  |
| <b>3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan</b>  |  |
| Penentuan Jabatan Kepala Desa   |  |
| Penentuan Sekretaris Desa   |  |
| Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun  |  |
| Masa jabatan Kepala Desa  | tahun  |
| Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan  |  |
| <b>4. Pemilihan BPD</b>   |  |
| Jumlah anggota BPD  | orang  |
| Penentuan anggota BPD   |  |
| Pimpinan BPD  |  |
| Pemilikan kantor/ruang kerja BPD  |  |
| Anggaran untuk BPD  |  |
| Produk keputusan BPD tahun ini  | 1. Peraturan Desa buah<br>2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa kali<br>3. Rancangan Peraturan Desa. buah<br>4. Menyalurkan aspirasi masyarakat kali<br>5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa kali |

|  |   |
|--|---|
|  | 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa kali |
|  | 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa kali     |
| <b>5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan</b>  |   |
| Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan  |   |
| Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD   |   |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan | unit organisasi   |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK   |   |
| Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan   | unit organisasi   |
| Pemilihan pengurus LKD/LKK   |   |
| Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya        |   |
| Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK   |   |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK  | kegiatan  |
| Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  |   |
| Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK  | kegiatan  |
| Alokasi anggaran untuk LKD/LKK   |   |
| Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya   |   |
| Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK   |   |
| Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD  |   |
| Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK   | 0,00 %  |
| Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK              |   |
| Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK  |   |

**C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN****1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan**

|   |               |
|---|---------------|
| Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan  | 4 kali        |
| Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan  | 90,00 %       |
| Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan   | 70,00 %       |
| Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan   | 30,00 %       |
| Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan   | 0,00 %        |
| Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif  |               |
| Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan   |               |
| Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif  | Ya            |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan   | 90,00 %       |
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa   | 90,00 %       |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan     | 2,00 %        |
| Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel   | 0 kegiatan    |
| Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)   | Ada           |
| Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)  | Ada           |
| Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan | Ada           |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi  | 10 . kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang  | 0 . kegiatan  |

**2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan**

|  |             |
|--|-------------|
| Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang                                      | 30,00 %     |
| Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota | 25,00 %     |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa             | 60 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah                                      | 0 kegiatan  |
| Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang                                    | 0,00 %      |
| Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan  | 0,00 %      |

|   |            |
|---|------------|
| Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan  | 0,00 %     |
| Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat | 0,00 %     |
| Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada  | Ada        |
| Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.   |            |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah                                       | 0 kasus    |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan   | 0 kasus    |
| Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum  | 0 kasus    |
| Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan   | 90 Jenis   |
| Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan  | 1 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota   | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi   | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN   | 0 kegiatan |
| <b>3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk</b>  |            |
| Jumlah kelompok arisan  | 10 buah    |
| Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh  | 0 orang    |
| Ada tidaknya dana sehat   | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah  | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah   | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus   | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana  | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha  | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun   | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya  | Tidak      |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan   | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian   | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan   | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi  | Ada        |
| Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya   | Ada        |
| <b>4. Adat Istiadat</b>   |            |
| Adat istiadat dalam perkawinan  | Aktif      |
| Adat istiadat dalam kelahiran anak  | Aktif      |
| Adat istiadat dalam upacara kematian  | Aktif      |
| Adat istiadat dalam pengelolaan hutan   | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam tanah pertanian   | Tidak      |
| Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai   | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga  | Aktif      |
| Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam   | Pernah Ada |
| Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya  | Aktif      |
| Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar   | Aktif      |
| <b>5. Sikap Dan Mental Masyarakat</b>   |            |
| Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan   | 0 jenis    |
| Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar   | 0 jenis    |
| Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah  | 1          |
| Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah   | 1          |
| Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal   | 0          |
| Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga   | 1 jenis    |
| Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga   | 1 jenis    |
| Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga   | 0 jenis    |
| Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.  | 0 kasus    |
| Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya  | 0 kasus    |
| Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya   | 0 kasus    |
| Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya   | 0 kasus    |
| Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan                     | 0          |
| Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan   | 0          |
| Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat   | 0          |
| Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri   | 0          |
| Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain  | 0          |

| <b>Etos Kerja Penduduk</b>   |                     |
|--|---------------------|
| Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas  | 0                   |
| Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasar  | 0                   |
| Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan   | 1                   |
| Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan  | 0                   |
| Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain  | 1                   |
| Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain                                  | 0                   |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota  | 0                   |
| Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya   | 0                   |
| Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak  | 1                   |
| Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan       | 1                   |
| Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen                    | 1                   |
| Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu   | 1                   |
| Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah   | 1                   |
| Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan  | 1                   |
| Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan  | 1                   |
| Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya  | 0                   |
| Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebi di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat | 1                   |
| <b>XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>   |                     |
| <b>A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN</b>  |                     |
| Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK   | Tidak               |
| Jumlah kegiatan  | Jenis               |
| <b>B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN</b>  |                     |
| <b>1. LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN</b>  |                     |
|  | <b>Ada</b>          |
| Kepengurusan   | Aktif/tidak         |
| Buku Administrasi  | Jenis               |
| Jumlah kegiatan  | 2 Jenis             |
| <b>2. PKK</b>  |                     |
|  | <b>Ada</b>          |
| Kepengurusan   | Aktif/tidak         |
| Buku Administrasi  | Jenis               |
| Jumlah kegiatan  | 10 Jenis            |
| <b>3. ORGANISASI PEMUDA LAINNYA</b>  |                     |
|  | <b>Ada</b>          |
| Kepengurusan   | Aktif/tidak         |
| Buku Administrasi  | Jenis               |
| Jumlah kegiatan  | 2 Jenis             |
| Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa  |                     |
| Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan   |                     |
| Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan   |                     |
| <b>XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN</b>   |                     |
| <b>A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan</b>  |                     |
| Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini  | Rp 1.386.889.540,00 |
| Sumber Anggaran  |                     |
| APBD Kabupaten/Kota  | Rp 22.995.000,00    |
| Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota  | Rp 0,00             |
| Bantuan Pemerintah Provinsi  | Rp 55.000.000,00    |
| Bantuan Pemerintah Pusat   | Rp 812.567.000,00   |
| Pendapatan Asli Desa   | Rp 60.960.000,00    |
| Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan  | Rp 0,00             |
| Alokasi Dana Desa  | Rp 400.317.000,00   |
| Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan   | Rp 0,00             |
| Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat   | Rp 35.050.540,00    |
| Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan  | Rp 751.467.000,00   |
| Jumlah Belanja Aparatur/pegawai  | Rp 405.672.822,00   |
| <b>B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah</b>   |                     |
| Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD   | 1                   |

|  |         |
|--|---------|
| Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat | 5 jenis |
| Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa   | 1       |
| Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota  | 1       |
| Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat   | 4 jenis |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah                   | 0 kasus |
| Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah                         | 0 kasus |
| <b>C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>   |         |
| <b>1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN</b>  |         |
| Gedung Kantor  | -       |
| Jumlah ruang kerja   | Ruang   |
| Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya  |         |
| Listrik  |         |
| Air bersih   |         |
| Telepon  |         |
| <b>1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>   |         |
| Jumlah mesin tik   | buah    |
| Jumlah meja  | buah    |
| Jumlah kursi   | buah    |
| Jumlah almari arsip  | buah    |
| Komputer   | unit    |
| Mesin fax  | unit    |
| Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa  | unit    |
| <b>1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan</b>  |         |
| Buku Data Peraturan Desa   |         |
| Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah   |         |
| Buku Administrasi Kependudukan   |         |
| Buku Data Inventaris   |         |
| Buku Data Aparat   |         |
| Buku Data Tanah Kas Desa   |         |
| Buku Administrasi Pajak dan Retribusi  |         |
| Buku Data Tanah  |         |
| Buku Laporan Pengaduan Masyarakat  |         |
| Buku Agenda Ekspedisi  |         |
| Buku Profil Desa dan Kelurahan   |         |
| Buku Data Induk Penduduk   |         |
| Buku Data Mutasi Penduduk  |         |
| Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan   |         |
| Buku Registrasi Pelayanan Penduduk   |         |
| Buku Data Penduduk Sementara   |         |
| Buku Anggaran Penerimaan   |         |
| Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan  |         |
| Buku Kas Umum  |         |
| Buku Kas Pembantu Penerimaan   |         |
| Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan  |         |
| Buku Data Lembaga Kemasyarakatan   |         |
| <b>2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD</b>  |         |
| Gedung Kantor  |         |
| Jumlah ruang kerja   | Ruang   |
| Balai BPD  | -       |
| Listrik  |         |
| Air bersih   |         |
| Telepon  |         |
| <b>2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor</b>   |         |
| Jumlah mesin tik   | buah    |
| Jumlah meja  | buah    |
| Jumlah kursi   | buah    |
| Jumlah almari arsip  | buah    |
| Komputer   | unit    |
| Mesin fax  | unit    |
| <b>2.B. Administrasi BPD</b>   |         |



|   |            |
|---|------------|
| Buku-buku administrasi kegiatan BPD   |            |
| Buku Buku Administrasi Keanggotaan  |            |
| Buku kegiatan BPD   |            |
| Buku himpunan peraturan desa  |            |
| Buku Lainnya  |            |
| <b>3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN</b>  |            |
| Gedung kantor atau Balai Pertemuan  |            |
| Alat tulis kantor   |            |
| Barang inventaris   | Jenis      |
| Buku administrasi   | Jenis      |
| Jenis kegiatan  | Jenis      |
| Jumlah pengurus   | Orang      |
| Jumlah ruang kerja  | Ruang      |
| <b>D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b>  |            |
| <b>1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>   |            |
| Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan   | Ada        |
| Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan  | Ada        |
| Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah   | Ada        |
| Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD  | Ada        |
| Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing  | Ada        |
| Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan  | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan  | 0 kegiatan |
| Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan   | 0 kegiatan |
| Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN | 0 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan   | 0 kali     |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  | 0 kali     |
| <b>2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>  |            |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan  | 1          |
| Pedoman bantuan keuangan dari provinsi  | 1          |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan  | 1          |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah   | 1          |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi  | 0 kegiatan |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan  | 0 jenis    |
| Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan   | 0 jenis    |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  | 0 jenis    |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan   | 0 jenis    |
| <b>3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>  |            |
| Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa   | 0 jenis    |
| Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa  | 1 jenis    |
| Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa  | 0 jenis    |
| Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.   | 1 jenis    |
| Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan   | 1 jenis    |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan  | 1 jenis    |
| Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa  | 1 jenis    |
| Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah   | 1 jenis    |
| Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota  | 4 jenis    |
| Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan  | 3 jenis    |

|   |         |
|---|---------|
| Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan  | 0 jenis |
| Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan  | 1 jenis |
| Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD   | 0 jenis |
| Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan  | 1 jenis |
| Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan   | 1 jenis |
| Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan  | 0 jenis |
| Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan   | 0 jenis |
| Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing  | 0 kasus |
| Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah  | 2 kasus |
| <b>4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan</b>  |         |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa  | 1 kali  |
| Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan  | 1 kali  |
| Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan   | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa   | 0 kali  |
| Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan   | 0 kali  |
| Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan   | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan  | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum   | 1 kali  |
| Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan  | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.  | 0 kali  |
| Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga  | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat   | 1 kali  |
| Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan   | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya  | 0 kali  |
| Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.  | 0 kali  |

KABUPATEN WONOSOBO, 31 Desember 2018  
 SIWURAN  
 Kecamatan GARUNG  
 Kabupaten KABUPATEN WONOSOBO

YAHYA  
 Kepala Desa

Tembusan :  
 1. Camat GARUNG  
 2. Bupati KABUPATEN WONOSOBO  
 3. Arsip